



STUDI PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KOTA SAMARINDA¹

Jawatir Pardosi

Dosen FKIP, Pascasarjana Kependidikan dan Magister Ilmu Lingkungan,
Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Samarinda.
Email: pardo_si@yahoo.com

Abstract

The study is aimed to analyze: (a) the benefit of CSR programs in improving the community welfare of local community; (b) the matching between CSR programs with the real needs of local community; and c) the matching of the CSR programs with government development program and the effectiveness of government role of implementing the CSR programs. The study used 325 respondents for survey and 15 participants in FGD. Data analysis used the descriptive qualitative, syllogistic, and data comparative. The results of this study showed that: (a) the CSR programs could improved the welfare of local community, (b) the CSR programs have matched with the community real needs in educational, socio-cultural, and infrastructure aspect. However, they do not match the agriculture and economy and (c) the Kukar Government is not effective as a facilitator and regulator in implementing the CSR.

Keywords: *CSR, community welfare, community real needs, government role.*

Intisari

Studi ini bertujuan untuk menganalisis: (a) manfaat program CSR dalam pengembangan kesejahteraan komunitas lokal; (b) kesesuaian program CSR dengan kebutuhan nyata komunitas lokal; dan (c) kesesuaian program CSR dengan program pembangunan pemerintah dan efektivitas peran pemerintah dalam pelaksanaan program CSR. Studi ini melibatkan 325 responden untuk survei dan 15 orang dalam FGD. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, silogistik, dan perbandingan data. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: (a) program CSR dapat memperbaiki kesejahteraan komunitas lokal; (b) program CSR memiliki kesesuaian dengan kebutuhan nyata komunitas dalam aspek pendidikan, sosial budaya, dan infrastruktur, tetapi tidak ada

¹ Naskah diterima: 27 Juli 2011, revisi: 6 Oktober 2011



kesesuaian dalam aspek pertanian dan ekonomi; dan (c) Pemerintah Kukar tidak efektif sebagai fasilitator dan regulator pelaksanaan CSR.

Kata kunci: CSR, kesejahteraan masyarakat, kebutuhan nyata masyarakat, peran pemerintah.

A. LATAR BELAKANG

Dari studi literatur diketahui adanya kaitan historis-konsepsional antara CSR dengan *community development (CD)*, yakni embrio kedua-duanya sama-sama berasal dari *community organization (CO)*. Konon, pelaksanaan pembangunan pada mulanya hanya merupakan tanggung jawab pemerintah (*government*). Namun, sejak pecahnya perang dunia I (1914) komunitas swasta (*corporate*) termasuk *non-government organization (NGO)* turut aktif (berinisiasi) dalam pelaksanaan pembangunan sebagai akibat banyaknya masalah yang tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah terutama sebagai akibat korban perang. Masyarakat mengorganisasikan dirinya (*community organization*) untuk berperan aktif (termasuk *NGO*), yang pada mulanya terutama adalah untuk mengatasi masalah (*problem solving*) pembangunan yang mendesak dihadapi masyarakat. *CO* terus membenahi dirinya hingga kemudian muncul gagasan pelaksanaan *CD*. Dalam prakteknya, program-program *CD* yang dilakukan oleh perusahaan kurang efektif karena mereka mengklaim *CD* bukan hanya tanggung jawab perusahaan tetapi juga tanggung jawab pemerintah dan masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (*LSM*) atau *NGO*. Dalam perkembangan selanjutnya, muncullah istilah *CSR* yang lebih bersifat imperatif kepada perusahaan

ketimbang *CD* berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Itulah sebabnya bahwa untuk memahami konsep *CSR* tidak bisa terlepas dari pemahaman tentang *CD*. *CD* dapat dipandang sebagai suatu pendekatan pelaksanaan pembangunan sehingga pendekatan tersebut dapat juga diterapkan dalam pelaksanaan program *CSR*.

Ife (1995) mengutarakan beberapa prinsip *CD*, yaitu antara lain sebagai berikut:

- (a) Pembangunan terintegrasi; kegiatan pembangunan masyarakat (*CD*) haruslah merupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan spiritual. Dengan kata lain, bila kegiatan pembangunan masyarakat difokuskan pada satu aspek, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitannya dengan aspek-aspek lainnya;
- (b) Penghargaan akan hak-hak azasi manusia; harus dapat menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap manusia untuk hidup secara layak dan baik;
- (c) Keberlanjutan; harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, sehingga penggunaan bahan-bahan yang *non-renewable* harus diminimalisir untuk



- kepentingan generasi berikutnya. Kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan tidak hanya untuk kepentingan sesaat;
- (d) Pemberdayaan; pemberdayaan merupakan tujuan dari pembangunan masyarakat. Menyediakan sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya, berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat;
 - (e) Meningkatkan rasa percaya diri; tidak menggantungkan diri kepada dukungan dari luar;
 - (f) Proses yang terintegrasi; tidak hanya mementingkan hasil namun juga prosesnya. Proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak, teknik, strategi yang kesemuanya harus terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar;
 - (g) Koperatif; membutuhkan struktur yang koperatif dan harmonis tanpa kekerasan, saling menguntungkan, melengkapi dan saling belajar;
 - (h) Partisipasi; memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan tujuan setiap orang dapat terlibat secara aktif didasarkan pada kesanggupan masing-masing;
 - (i) Sesuai kebutuhan; harus sesuai dengan kebutuhan nyata (*real needs*) dari komunitas lokal sehingga bersifat *bottom-up* dan bukan karena kehendak agen pembaharu;
 - (j) Menjauhkan kekerasan; bukan merupakan paksaan yang menimbulkan gegar budaya

(*culture shock*), namun menghargai nilai-nilai dan mengembangkan saling pengertian (*mutual understanding*).

Rothman (1995) mendefinisikan *community* (komunitas) sebagai: (a) sekelompok orang yang hidup dalam, (b) suatu wilayah tertentu yang memiliki, (c) pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung dan, (d) memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota, (e) yang mempunyai kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, dan (f) mampu bertindak secara kolektif dengan cara teratur. Dari beberapa sumber diketahui indikator pembangunan masyarakat seperti disajikan pada Tabel 1.

Konsep CSR mulai dikenal sejak tahun 1990-an sebagai standar etik bagi perusahaan, ketika dilakukan konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazilia tahun 1992. Hingga saat ini, konsep dan praktek CSR masih menjadi topik hangat di tanah air, penuh dengan kontroversi. Masih banyak kalangan menolak adanya praktek tanggung jawab sosial ini, dengan alasan bahwa tanggung jawab perusahaan adalah terletak pada *stakeholder*-nya. Mereka beranggapan tanggung jawabnya telah dipenuhi dalam bentuk kewajiban perusahaan menyetorkan sebagian pendapatannya pada pemerintah. Pendapatan yang diterima pemerintah ini kemudian dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.



Tabel 1. Indikator Pembangunan Masyarakat

Aspek Kajian	Uraian
Ruang Lingkup	Kelompok/komunitas
Pendekatan	<i>Bottom up</i>
Perencana	Komunitas lokal, agen pembaharu dari luara
Jenis Perubahan	Perubahan berencana
Peran agen pembaharu	<i>Edukator, fasilitator, motivator dan advokator</i>
Pelaksana	Komunitas lokal
Proses	Edukatif, demokratis, keterlibatan dan orientasi proses
Evaluator	Komunitas lokal, agen pembaharu dari luar
Kelompok sasaran	Kelompok, komunitas
Metode	Partisipatif, berdasar sumberdaya lokal, media
Tujuan	Memperbaiki sosial ekonomi/kualitas hidup
<i>Outcome</i>	<i>Empowerment, sustainability, self reliance</i>

Sumber: Batten, T.R. (1957); Rothman, Jack (1995) dan Ife (1995)

Pambudi (2005) mengemukakan bahwa salah satu pelopor yang mematahkan *CSR* sebagai suatu kesukarelaan adalah Phil Watts. Phil Watts menganjurkan *CSR* bukan semata komitmen atau kesukarelaan tetapi sudah menjadi kewajiban sebagaimana dikatakannya: “*CSR is not a cosmetic, it must be rooted in our valued. It must make difference to the way we do our business.*” *CSR* adalah merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Dalam konsep ini dikenal beberapa istilah, yaitu:

(a) Pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut;

(b) *Multi stakeholder (MSH)* adalah sekumpulan pemangku kepentingan;

© Prakarsa *MSH-CSR* adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan *multi stakeholder*, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan praktek terbaik dan berkelanjutan dari program *CSR*;

(d) Forum *MSH-CSR* adalah model organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan *CSR* yang berkelanjutan, yang kepengurusannya serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.

Dalam praktek, *CSR* yang merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pembangunan masyarakat masih banyak dilakukan karena faktor belas kasihan (*charity*) atau dilakukan karena keterpaksaan. Sebagai belas kasihan,



karena perusahaan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat miskin ada kadarnya tanpa memandang sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. Sebagai paksaan, karena bantuan baru menyusul kemudian diberikan setelah adanya aksi protes dari masyarakat. Oleh karena itu, *CSR* tidak boleh dihindari oleh perusahaan sebagai tuntutan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sejauh mana manfaat program *CSR* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di kawasan pertambangan?
- (2) Apakah program-program *CSR* yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan nyata (*real needs*) masyarakat lokal?
- (3) Apakah program-program *CSR* sudah sinkron dengan program/kebijakan pemerintah? Dan bagaimana pemerintah berperan secara efektif sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator?

Penelitian terdahulu tentang *CSR* pada umumnya memandang segala program pembangunan atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk perbaikan kehidupan komunitas lokal adalah identik dengan *CSR*. Malahan, hanya berupa bantuan dana (uang) yang diberikan oleh perusahaan baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dianggap

sebagai program *CSR*. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sadikin (2009) tentang implementasi program *CSR* pada masyarakat sekitar pertambangan batubara misalnya, dipandang sebagai program *CSR* walaupun program tersebut hanya dilakukan oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan prakarsa/inisiasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Marten Apuy (2008). Ia menyimpulkan bahwa perusahaan yang ia teliti telah melaksanakan program *CSR* yang baik tanpa memberikan kajian terhadap keterlibatan masyarakat dalam program *CSR*. Bantuan berupa materi (uang atau bantuan fisik seperti sarana prasarana desa) dan atau immaterial (ceramah tentang kesehatan, kebersihan desa dan keagamaan) yang dilakukan secara *top down* atau bantuan bersifat karitatif semata dipandang sebagai program *CSR*. Program *CSR* bukanlah program yang hanya dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi adalah program yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan, komunitas lokal dan pemerintah seperti dijelaskan pada bagian indikator pembangunan masyarakat (Tabel 1).

Berbeda dari penelitian seperti dijelaskan di atas, penelitian ini memberikan perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip dan indikator *CD* dalam pelaksanaan program *CSR*. *CD* sebagai suatu pendekatan pembangunan seyogyanya diterapkan dalam pelaksanaan program *CSR*. Itulah sebabnya, kajian tentang pelaksanaan program *CSR* dapat menggunakan pendekatan program *CD*. Bahkan dalam literatur dan beberapa perusahaan menggunakan



dan mempertukarkan kedua istilah tersebut untuk maksud yang sama. Ali Sadikin (2009); Andal PT. Khotai Makmur Insan Abadi (2009) dan PT. Darma Putera Wahana Pratama (2010) misalnya, mempertukarkan kedua istilah tersebut untuk maksud yang sama.

Di samping itu, kekhasan studi ini ialah mengkaji *CSR* lebih menekankan dari sisi proses ketimbang hasil, yakni anggota masyarakat mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan bersama. Juga mencakup kajian terhadap perencanaan program yang difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*real needs*), bantuan teknis, integrasi berbagai keahlian untuk membantu masyarakat serta ditekankan pada prinsip gotong-royong dan partisipasi masyarakat sebagai mana diutarakan oleh Batten (1957), Dunham (1962) dan Ife (1995).

Adanya penggunaan istilah yang tumpang tindih antara *CD* dan *CSR* sebetulnya tidak perlu terjadi apabila dipahami bahwa *CD* adalah suatu bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan. *CSR* sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebetulnya keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur/dilihat dari sejauh mana program *CSR* tersebut menerapkan prinsip-prinsip dan indikator *CD*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei tentang pelaksanaan program *CSR* pada satu perusahaan

saja. Penelitian dilakukan pada empat desa sampel yaitu: (a) Berambai, (b) Kerta Buana, (c) Bukit Pariaman, dan (d) Separi Mahakam. Untuk keperluan pengambilan data berdasarkan kuesioner maka pengambilan sampel dilakukan secara proporsional yang terdiri atas 35 orang dari Desa Berambai, 100 orang dari Desa Karta Buana, 90 orang dari Desa Separi Mahakam, dan 100 orang dari Desa Bukit Pariaman. Di samping itu, untuk melengkapi data yang tidak bisa melalui kuesioner ditetapkan 15 orang sebagai informan untuk mengikuti *Focussed Group Discussion (FGD)*. Informan terdiri atas: komunitas lokal 2 orang, tokoh adat 2 orang, tokoh pemuda 1 orang, tokoh agama 3 orang, LSM 2 orang, aparat desa 2 orang, Dewan Perwakilan Desa (DPD) 1 orang, aparat kecamatan 1 orang, dan manajemen perusahaan 1 orang. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang didukung oleh tabel distribusi frekuensi dan persentase dan komparasi data yang tersedia. Penelitian dilakukan sejak Februari sampai Mei 2011.



Tabel 2. Parameter dan Pengukuran Kesejahteraan Komunitas Lokal

Parameter	Pengukuran	Skor
1. Pendapatan	Peningkatan pendapatan/penghasilan masyarakat sama sekali tidak dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan	1
	Peningkatan pendapatan/penghasilan sebagian masyarakat dipengaruhi oleh adanya perusahaan meskipun kecil	2
	Perusahaan sangat berpengaruh besar terhadap penghasilan/pendapatan seluruh masyarakat	3
2. Pendidikan	Perusahaan tidak berperan aktif dalam perkembangan pendidikan	1
	Perusahaan berperan dalam perkembangan pendidikan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana meskipun hanya untuk sebagian kecil siswa dan dengan jumlah yang bervariasi	2
	Perusahaan berperan aktif dalam perkembangan pendidikan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk sekolah dan siswanya	3
3. Kesehatan	Perusahaan tidak membantu masyarakat untuk pengadaan air bersih dan sarana kesehatan bahkan penyuluhan kesehatan	1
	Perusahaan membantu masyarakat untuk pengadaan air bersih dan memberikan bantuan kesehatan (meskipun baru sebagian saja) tetapi tidak memberikan penyuluhan kesehatan	2
	Perusahaan membantu masyarakat untuk pengadaan air bersih dan memberikan bantuan kesehatan baik sarana maupun penyuluhan meskipun baru dirasakan oleh sebagian masyarakat saja	3
4. Gizi	Perusahaan tidak berperan memperbaiki menu makanan sehari-hari, yakni hanya nasi dan lauk atau sayur saja	1
	Perusahaan berperan memperbaiki menu makan sehari-hari yang sehat yaitu nasi dan lauk pauknya	2
	Perusahaan sangat berperan memperbaiki menu makanan sehari-hari yang sempurna, yaitu nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu	3
5. Sandang	Perusahaan tidak berperan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli sandang/pakaian	1
	Perusahaan berperan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli sandang/pakaian meskipun terdapat kenaikan harga barang dan penambahan anggota keluarga	2
	Perusahaan berperan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli sandang/pakaian dan perlengkapan/penunjang pakaian (misal asesoris, kosmetik, sepatu, dll) meskipun terdapat kenaikan harga barang dan penambahan anggota keluarga	3
6. Perekonomian	Perusahaan tidak membantu perekonomian desa baik sarana maupun prasarana	1
	Perusahaan membantu perekonomian desa dengan bantuan modal tetapi tidak diiringi dengan penyuluhan maupun sarana	2
	Perusahaan membantu koperasi di desa dengan memberikan bantuan modal usaha termasuk sarana dan prasarananya	3

Ket.: Skor 1: Rendah; Skor 2: Sedang dan Skor 3: Tinggi

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manfaat Program CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal

Masa pembinaan yang relatif baru (4-5 tahun), secara teoritis belum

terlalu banyak program CSR yang memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan komunitas lokal (empat desa binaan). Secara detil manfaat CSR tersebut diuraikan sebagai berikut:



a. Manfaat CSR pada Bidang Pendapatan

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa manfaat program CSR pada bidang peningkatan pendapatan lebih dapat dirasakan oleh komunitas lokal adalah pada Desa Berambai dan Desa Bukit Pariaman dibandingkan dengan Desa Kerta Buana dan Desa Separi Mahakam. Kedua Desa yang memperoleh nilai paling tinggi dari manfaat program CSR berturut-turut adalah Desa Bukit Pariaman dengan nilai 2,63 dan Desa Berambai dengan nilai 2,60. Manfaat program CSR yang paling rendah pada bidang pendapatan dengan nilai 2,08 adalah Desa Separi Mahakam.

b. Manfaat CSR pada Bidang Perbaikan Pendidikan

Pada keempat desa binaan masih relatif sedikit (kategori rendah atau kurang dari nilai 2) menerima manfaat CSR dalam bidang pendidikan. Desa binaan paling sedikit menerima manfaat ialah Desa Kerta Buana (1,28) disusul berturut-turut Desa Bukit Pariaman (1,29); Desa Separi Mahakam (1,31) dan Desa Berambai (1,46). Bantuan bidang pendidikan yang diterima oleh keempat desa binaan adalah pada umumnya adalah berupa beasiswa dan buku-buku mata pelajaran.

Tabel 3. Manfaat CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal menurut Desa Sampel

Peningkatan Pendapatan	Desa							
	Berambai (N: 35)	Hasil Perhitungan	Kerta Buana (N: 100)	Hasil Perhitungan	Separi Mahakam (N: 90)	Hasil Perhitungan	Bukit Pariaman (N: 100)	Hasil Perhitungan
Rendah (1)	0	0	11	11	17	17	3	3
Sedang (2)	14	28	33	66	49	98	31	62
Tinggi (3)	21	63	56	168	24	72	66	198
Jumlah		91		235		187		263
Rata-rata		2.60		2.35		2.08		2.63
Perbaikan Pendidikan								
Rendah (1)	20	20	72	72	63	63	71	71
Sedang (2)	14	28	28	56	26	52	29	58
Tinggi (3)	1	3	0	0	1	3	0	0
Jumlah		51		128		118		129
Rata-rata		1.46		1.28		1.31		1.29
Perbaikan Kesehatan								
Rendah (1)	3	3	43	43	68	68	72	72
Sedang (2)	18	38	48	96	22	44	27	54
Tinggi (3)	14	42	9	27	0	0	1	3
Jumlah		83		166		112		129
Rata-rata		2.37		1.66		1.24		1.29
Perbaikan Gizi								
Rendah (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedang (2)	14	28	16	12	54	108	25	50
Tinggi (3)	21	63	84	252	36	108	75	225
Jumlah		91		264		216		275
Rata-rata		2.60		2.64		2.40		2.75



Perbaikan Sandang								
Rendah (1)	0	0	2	2	0	0	0	0
Sedang (2)	34	68	93	186	89	178	100	200
Tinggi (3)	1	3	5	15	1	3	0	0
Jumlah		71		203		181		200
Rata-rata		2.03		2.03		2.01		2.00
Perbaikan Lembaga Perekonomian								
Rendah (1)	35	35	95	95	89	89	0	0
Sedang (2)	0	0	1	2	1	2	100	200
Tinggi (3)	0	0	4	12	0	0	0	0
Jumlah		35		109		91		200
Rata-rata		1.00		1.09		1.01		2.00

Ket.: Hasil Perhitungan = Alternatif Jawaban Responden X Jumlah Responden yg Menjawab
Rata-rata = Jumlah Jawaban Responden : Jumlah Responden

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian 2011

Walaupun manfaat *CSR* pada empat desa binaan relatif sedikit dalam bidang pendidikan, namun kondisi pendidikan pada keempat desa binaan tersebut sudah tergolong baik. Tidak terdapat orang yang buta huruf dan sebagian besar (60%) telah menamatkan studi dari jenjang pendidikan SMP.

c. Manfaat *CSR* pada Bidang Perbaikan Kesehatan

Keempat desa binaan merasakan manfaat *CSR* dengan kondisi yang beragam (berbeda-beda). Desa yang paling banyak merasakan manfaat program *CSR* adalah Desa Berambai dengan angka rata-rata 2.37. Ketiga desa lain berturut-turut adalah Desa Kerta Buana (1,66); Desa Bukit Pariaman (1,29) dan Desa Separi Mahakam (1,24). Angka-angka ini berarti bahwa perusahaan telah berperan membantu masyarakat untuk pengadaan air bersih dan bantuan kesehatan dalam jumlah yang terbatas. Pada keempat desa tersebut seluruhnya belum pernah menerima penyuluhan kesehatan.

d. Manfaat *CSR* pada Bidang Perbaikan Gizi

Manfaat *CSR* pada bidang perbaikan gizi pada keempat desa binaan tergolong cukup baik (sedang) dengan rata-rata di atas angka 2 (sedang). Berturut-turut keempat desa tersebut merasakan manfaat *CSR* adalah Desa Bukit Pariaman 2,75; Desa Kerta Buana 2,63; Desa Berambai 2,60 dan Desa Separi Mahakam 2,40. Angka-angka ini berarti perusahaan berperan memperbaiki menu makanan sehari-hari yang sehat yaitu nasi dan lauk-pauknya.

e. Manfaat *CSR* pada Bidang Perbaikan Sandang

Manfaat program *CSR* pada bidang perbaikan sandang pada keempat desa binaan menunjukkan keadaan yang cukup baik, yaitu berada pada angka rata-rata 2 ke atas. Dua desa yang merasakan manfaat yang sama ialah Desa Berambai dan Desa Kerta Buana dengan nilai rata-rata yaitu 2,03. Dua desa lainnya yaitu Desa Bukit Pariaman dan Desa Separi



Mahakam berturut-turut adalah rata-rata 2 dan 2,01.

Berdasarkan data dari *FGD* hasil dapat pula diketahui bahwa keempat desa binaan telah mengalami perbaikan sandang, yakni pada umumnya telah memiliki cukup dana untuk biaya hidup kebutuhan sandang dan memiliki cukup pakaian untuk dipergunakan di rumah, bekerja, dan pesta.

f. Manfaat CSR pada Bidang Perbaikan Lembaga Perekonomian

Manfaat program *CSR* pada bidang perbaikan lembaga perekonomian desa pada keempat desa binaan pada umumnya masih rendah dengan nilai rata-rata kurang dari 2 kecuali pada Desa Bukit Pariansan dengan nilai rata-rata 2. Ketiga desa lainnya secara berturut-turut adalah Desa Kerta Buana 1,09; Desa Separi Mahakam 1,01 dan Desa Berambai 1.

Berdasarkan data dari hasil *FGD* diketahui bahwa pada keempat desa masih relatif kurang lembaga-lembaga perekonomian desa. Tiga desa (Desa Kerta Buana, Desa Bukit Pariansan dan Desa Separi Mahakam) telah memperoleh masing-masing 1 buah KUD dan hanya Desa Berambai yang memiliki 2 Koperasi. Walaupun keempat desa telah memiliki KUD, namun peran *CSR* belum memadai dalam memberikan bantuan atau pembinaan pada koperasi yang ada. Koperasi belum dapat berperan untuk menunjang

perkembangan ekonomi desa.

Masyarakat pada umumnya lebih cenderung menggunakan lembaga perekonomian (Bank) yang terdapat di Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi karena relatif terjangkau dari tempat tinggal mereka.

Kesesuaian Program CSR dengan Kebutuhan Masyarakat

Bukti-bukti empiris selama ini menunjukkan bahwa walaupun perusahaan telah mengeluarkan dana ratusan juta bahkan ratusan milyar rupiah namun bila program tersebut tidak sesuai kebutuhan masyarakat lokal maka penolakan dan aksi-aksi protes terhadap perusahaan tetap terjadi. Ketidakesesuaian tersebut akan mengakibatkan kerugian secara sosial dan ekonomi bahkan akan berpotensi merusak reputasi perusahaan dan mengganggu keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, unsur penting untuk menilai kelayakan program *CSR* adalah melihat kesesuaian program tersebut dengan kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar program *CSR* yang dilakukan meliputi bidang-bidang, yaitu: (1) pendidikan dan pengetahuan, (2) kesehatan, (3) pertanian, (4) ekonomi, (5) sosial budaya, dan (6) infrastruktur. Keenam bidang tersebut dilaksanakan pada keempat desa binaan seperti disajikan pada Tabel 4.

Pada Tabel 4 tampak adanya perbedaan kegiatan pada setiap desa, kecuali pemberian dana beasiswa. Pemberian dana beasiswa menjadi prioritas program karena masyarakat



lokal sebahagian besar (48,28 %) bekerja sebagai petani dengan pendapat yang relatif rendah. Pendapat rendah anggota keluarga mengakibatkan kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Pada keempat desa ini angka partisipasi sekolah dari usia anak sekolah adalah rendah.

Kondisi ini merupakan alasan sehingga pemberian beasiswa untuk mendorong peningkatan partisipasi sekolah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera mendapat perhatian dan dilaksanakan dalam program *CSR*. Pada tahun 2006 misalnya, jumlah dana untuk beasiswa adalah sebesar Rp 92.265.000. Di samping itu, kebutuhan pada bidang pendidikan tampak dari kegiatan pemberian insentif guru (TK, SD dan SLTP) dan pengadaan sarana bermain untuk TK.

Kebutuhan pada bidang kesehatan tampak mendapat prioritas

terutama pemberian makanan tambahan, vaksinasi di Posyandu dan pemberian dana operasional Posyandu. Ketiga kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Penentuan program bidang kesehatan tampak lebih diprioritaskan pada usia balita, yakni yang dapat terlayani melalui Posyandu. Pelayanan kesehatan melalui Posyandu merupakan tindakan solutif untuk menjangkau keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Keluarga yang lemah secara ekonomi ini pada umumnya rentan pada kondisi gizi buruk terutama pada usia balita. Kerawanan kesehatan yang ditandai oleh gizi buruk ini juga dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Oleh karena itu, program *CSR* melalui Posyandu merupakan kebutuhan mendesak dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu segera ditanggulangi.

Tabel 4. Rincian Program *CSR* menurut Desa Binaan

No.	Bidang	Desa Binaan			
		Berambai	Kerta Buana	Bukit Pariaman	Separi Mahakam
	Pendidikan dan Pengetahuan				
1.	Beasiswa	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
2.	Insentif Guru (TK, SD, SLTP)	-	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
3.	Sarana TK	-	-	-	1 Tahun
4.	Pelatihan Satpam	-	-	1 Tahun	-
5.	Pengadaan Komputer Desa/Kelurahan	1 Tahun	-	-	-
6.	Dana Operasional penunjang Program	-	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
	Kesehatan				
1.	Makanan tambahan di Posyandu	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
2.	Vaksinasi di Posyandu	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
3.	Pengadaan Raskin	-	-	-	1 Tahun
4.	Pengadaan sembako	-	-	-	1 Tahun
5.	Pengadaan peralatan vaksinasi	-	1 Tahun	-	-
6.	Dana operasional Posyandu	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
	Pertanian				
1.	Pembersihan parit kelompok tani	-	1 Tahun	-	-
2.	Pemberian pupuk	1 Tahun	2 Tahun	-	-
3.	Peminjaman lahan	-	2 Tahun	-	-



4.	Pengadaan peralatan dan penyemprotan hama	-	2 Tahun	-	-
5.	Pengadaan pakan ternak	-	1 Tahun	-	-
	Ekonomi				
1.	Pengadaan keramba ikan	-	2 Tahun	-	-
2.	Peminjaman lahan untuk keramba dan usaha batu bata	-	2 Tahun	-	-
	Sosial Budaya				
1.	Peringatan hari kemerdekaan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
2.	Kegiatan hari besar Islam	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
3.	Kegiatan hari besar kristiani	-	2 Tahun	2 Tahun	-
4.	Kegiatan hari besar Hindu	-	2 Tahun	2 Tahun	-
5.	Kegiatan pembinaan rohani (Islam, Kristen, dan Hindu)	-	-	-	1 Tahun
6.	Dana operasional pemeliharaan dan pelantikan Kepala Desa	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
7.	Dana operasional Karang Taruna	-	2 Tahun	-	2 Tahun
8.	Dana operasional pemilihan BPD	-	-	-	1 Tahun
9.	Dana operasional pemerintahan desa	-	-	-	1 Tahun
10.	Dana operasional program (FKM/FORKOM)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-
11.	Pembentukan FKM	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-
	Infrastruktur Desa				
1.	Pengurukan, perbaikan dan pengerasan jalan	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun
2.	Pembangunan sekretariat BPD	-	-	-	1 Tahun
3.	Pengadaan air bersih	-	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
4.	Gereja dan Pura	1 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
5.	Pembuatan jembatan	-	-	1 Tahun	-
6.	Pembangunan sekretariat Posyandu	1 Tahun	-	-	-
7.	Perbaikan saluran irigasi	-	1 Tahun	-	-
8.	Pengadaan sarana olahraga	1 Tahun	-	-	-

Sumber: Hasil Penelitian 2011

Di samping pelayanan melalui Posyandu, tampak dilakukan kegiatan pemberian beras miskin dan sembilan bahan makanan pokok yang ditujukan kepada keluarga miskin. Program raskin dan sembako ini merupakan kegiatan sintomis yang mendesak yang diharapkan dapat mengurangi kesulitan keluarga-keluarga miskin.

Kegiatan pada bidang pertanian tampak merupakan prioritas pada Desa Kerta Buana. Sebaliknya, pada tiga desa lainnya, yaitu Berambai, Bukit Pariaman dan Separi Mahakam program bidang pertanian bukan merupakan prioritas (kebutuhan mendesak). Program pertanian yang

dilaksanakan pada Desa Kerta Buana berkisar pada pembersihan parit, pemberian pupuk, peminjaman lahan, pengadaan peralatan dan penyemprotan hama, dan pengadaan pakan ternak. Kegiatan berkaitan dengan pengembangan pertanian dan pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian seperti pendidikan dan pelatihan usaha tani tidak dilakukan.

Apabila kita perhatikan keadaan penduduk pada tiga desa kawasan pertambangan, sebagian besar ($\pm 70\%$) adalah bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun terdapat variasi tingkat pendapat rata-rata penduduk di tiga desa, namun secara keseluruhan



masih relatif rendah, yaitu berkisar Rp 750.000 sampai Rp 2.000.000. *CSR* bidang pengembangan pertanian sebaiknya merupakan salah satu prioritas yang perlu dilakukan pada tiga desa kawasan pertambangan. Sistem intensifikasi pertanian yang diolah dengan teknologi relatif sederhana mengakibatkan hanya 1 kali musim panen dalam 1 tahun. Produktivitas hasil pertanian di kawasan pertambangan juga relatif kecil, yaitu 4-5 ton per hektar. Oleh karena itu, pengembangan pertanian seperti perbaikan irigasi dan pemanfaatan teknologi modern adalah penting untuk mengupayakan 2 kali musim panen dalam 1 tahun di lokasi-lokasi strategis. Peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian juga penting karena mereka merupakan ujung tombak bagi pemberdayaan petani.

Program kegiatan bidang ekonomi tampak hanya ada pada Desa Kerta Buana. Kegiatannya pun terbatas pada pengadaan keramba ikan dan peminjaman lahan untuk keramba dan usaha batu bata. Kegiatan ekonomi produktif semestinya perlu digalakkan untuk menggairahkan ekonomi penduduk setempat. Pada tiga desa, yakni Berambai, Bukit Pariaman dan Separi Mahakam program pengembangan ekonomi seyogyanya dilaksanakan.

Program *CSR* untuk mempercepat proses peningkatan keberdayaan masyarakat di kawasan penambangan dapat dilakukan melalui meningkatkan kapasitas masyarakat menggunakan lembaga-lembaga ekonomi yang tersedia di desa. Lembaga-lembaga ekonomi tersebut

meliputi: (a) lembaga-lembaga pemasaran sarana produksi pertanian, mulai dari produsen sampai distributor di tingkat petani (desa); (b) lembaga-lembaga penunjang kegiatan produksi, seperti: lembaga keuangan/perbankan dan koperasi; dan (c) lembaga-lembaga pemasaran produk pertanian, sampai distribusi kepada konsumen yang membutuhkan.

Kegiatan bidang sosial budaya merupakan prioritas dari program *CSR* di setiap desa binaan. Namun, ada perbedaan penekanan untuk setiap desa yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dukungan perusahaan untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan RI dan hari besar umat Islam tampak merupakan kegiatan yang sudah berlangsung selama dua tahun untuk setiap desa.

Dukungan untuk kegiatan kerohanian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dukungan kegiatan hari besar Kristiani dan Hindu misalnya, hanya dilaksanakan pada Desa Kerta Buana dan Desa Bukit Pariaman karena pada dua desa ini jumlah penganut kedua agama tersebut signifikan. Dukungan kegiatan pembinaan rohani (Islam, Kristen, dan Hindu) baru dilaksanakan setahun di Desa Separi Mahakam.

Kebutuhan yang mendapat dukungan tampak pula pada dana operasional desa. Hal ini penting mengingat pemerintahan desa memiliki posisi strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa untuk melaksanakan program-program



pembangunan. Posisi kepala desa adalah penting, oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan kapabilitas kepala desa melalui kursus-kursus kepemimpinan dan manajemen desa.

Pendanaan untuk pembentukan dan operasional FKM yang sudah dilaksanakan pada tiga desa merupakan pertanda positif bagi pelaksanaan program *CSR*. FKM diharapkan dapat lebih berperan menyelenggarakan dan menerapkan program-programnya apabila mendapat dukungan dana yang memadai.

Kebutuhan akan pembangunan dan perbaikan infrastruktur merupakan prioritas program *CSR* pada empat binaan. Alasan pentingnya pembangunan infrastruktur adalah karena kondisi infrastruktur yang memadai di pedesaan akan mempercepat proses pembangunan pada bidang-bidang yang lainnya. Akan tetapi penting adanya skala prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Pengurukan, perbaikan dan pengerasan jalan merupakan prioritas kegiatan pada Desa Berambai, Kerta Buana dan Separi Mahakam karena jalan desa di wilayah ini adalah jalan tanah yang licin dan becek pada waktu turun hujan. Juga tampak pembangunan gedung gereja dan pura yang merupakan prioritas program pengembangan masyarakat pada setiap desa binaan. Hal ini dilaksanakan agar penganut kedua jenis agama tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Prioritas pembangunan lainnya

adalah air bersih pada Desa Kerta Buana, Bukit Pariaman dan Separi Mahakam. Berbeda dari ketiga desa tersebut, Desa Berambai lebih membutuhkan pembangunan sekretariat Posyandu dan sarana olah raga.

Beberapa prioritas pembangunan infrastruktur lainnya adalah pembangunan sekretariat BPD di Desa Separi Mahakam, pembuatan jembatan di Desa Bukit Pariaman dan pembangunan saluran irigasi di Desa Kertabuana. Sekretariat BPD diharapkan dapat berfungsi sebagai kantor perangkat BPD dan wadah penampungan aspirasi masyarakat. Pembangunan jembatan diharapkan mampu mendukung arus mobilitas penduduk desa yang semakin tinggi. Pembangunan saluran irigasi di Desa Kerta Buana diharapkan dapat berfungsi untuk memenuhi pengairan sawah karena selama ini hanya mengharapkan air hujan. Akibatnya, pada musim kemarau produktivitas padi jauh menurun.

Pembangunan infrastruktur yang sebenarnya mendesak pada keempat desa ini adalah lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi dan perbankan. Di samping itu, sarana dan prasarana pendidikan seperti mebel SD, sarana/paket buku pelajaran pegangan untuk guru dan murid kurang.

Sinkronisasi Program *CSR* dengan Program/Kebijakan Pembangunan Daerah Kukar

Salah satu parameter penting untuk menilai keberhasilan *CSR* ialah sinkronisasi program *CSR* dengan



pembangunan yang dirumuskan/dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Termasuk dalam hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Alasannya adalah karena peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan Kukar yang berkelanjutan bukan tanggung jawab perusahaan semata, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kukar Tahun 2005-2010 ditandakan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kukar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan pembangunan Kukar selama ini bertumpu dan berbasis unggulan pada sektor pertambangan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar mengambil kebijakan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam yang dimiliki dan menggeser secara bertahap eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui ke sumberdaya alam yang dapat diperbaharui sejak tahun 2005.

Tahun 2005-2010 ditandakan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kukar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan pembangunan Kukar selama ini bertumpu dan berbasis unggulan pada sektor pertambangan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar mengambil kebijakan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam yang dimiliki dan menggeser

secara bertahap eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui ke sumberdaya alam yang dapat diperbaharui sejak tahun 2005.

Sejak tahun 2005, arah pembangunan Kabupaten Kukar memprioritaskan tiga bidang pengembangan, yaitu: (1) peningkatan sumberdaya manusia, (2) pengembangan pertanian dalam arti luas dan (3) pengembangan industri pariwisata. Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu mengelola sekaligus mempertahankan sumberdaya alam dengan baik. Pengembangan sumberdaya manusia pada seluruh unsur pelaksana pembangunan.

Kegiatan pokok mencakup pengembangan pendidikan baik formal maupun non formal. Pada pendidikan formal mencakup penerapan wajib belajar 9 tahun, peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan sekolah menengah, peningkatan mutu tenaga pendidik, pembinaan perpustakaan, pengembangan penelitian dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan SDM pada seluruh dinas dan instansi melalui kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan.

Sinkronisasi program *CSR* dengan prioritas pembangunan Kukar dalam bidang pengembangan SDM tampak lebih mengutamakan memperhatikan pendidikan formal saja. Pendidikan formal dimaksud juga belum memperhatikan kebutuhan mendesak seperti pengadaan perpustakaan, buku pegangan guru dan murid. Pengembangan pendidikan non



formal pun belum mendapat perhatian yang serius.

Pada bidang pengembangan pertanian tampaknya masih kurang diperhatikan. Hal ini tampak dari program *CSR* yang hanya melakukan sebagian kecil saja dengan dana yang sangat terbatas, seperti pemberian pupuk, peminjaman lahan, pengadaan peralatan dan penyemprotan dan pengadaan pakan ternak. Program *CSR* hanya dilaksanakan di Desa Kerta Buana, selain pemberian pupuk di Desa Berambai. Tampak belum terdapat sinkronisasi yang baik dan terkesan kurang memperhatikan pembangunan pertanian ini. Kebijakan pembangunan pertanian sebagai prioritas sebagai pembangun Kukar sejak tahun 2005, tampaknya hanya slogan semata. Tidak adanya regulasi yang jelas tentang pengembangan kelembagaan pertanian seperti, penyuluhan pertanian, kehutanan, peternakan dan tidak jelasnya status penyuluh-penyuluh.

Peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan dinamisor dalam pelaksanaan *CSR* belum efektif. Semestinya pemerintah Pemkab Kukar masuk dalam FKM karena Pemkab Kukar merupakan bagian pemangku kepentingan (*stake holder*). Dalam posisi tersebut dapat memainkan peran sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator berarti memberi kemudahan bagi FKM untuk melakukan program-program *CSR* yang sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Peran sebagai fasilitator dapat berupa menyediakan fasilitas milik pemerintah untuk dipergunakan oleh FKM. Misalnya, gedung-gedung, buku-buku, arsip-

arsip dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemkab Kukar.

Peran sebagai regulator adalah membuat aturan yang standar bagi mekanisme pelaksanaan *CSR*. Dengan cara ini para pemangku kepentingan memiliki baku mutu kinerja (*standart of performance*) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Para pemangku kepentingan akan merasa hak-haknya terlindungi dan bekerja lebih produktif. Bila diperlukan, dalam rangka pembuatan regulasi, dapat bekerja sama dengan legislator.

Peran sebagai dinamisor adalah menggerakkan atau mendinamikkan FKM agar dapat bekerja lebih bergairah. FKM akan lebih berdinamika dan produktif karena masing-masing pemangku kepentingan selalu didorong dan dimotivasi untuk lebih aktif berkarya. Motivasi bagi pihak-pihak pemangku kepentingan akan lebih besar apabila Pemkab Kukar memberi penghargaan atau pengakuan (*rekognisi*). Pengakuan akan keberadaan dari FKM akan sangat bermakna bagi para pemangku kepentingan dan selanjutnya akan menggairahkan mereka bekerja.

Dengan dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka secara legalitas formal perseroan memiliki tanggung sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat 1, UU Tahun 2007 menandakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.



Walaupun pada ayat 2 pasal 74 UU tersebut menandakan bahwa besar kewajiban perusahaan dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, pada ayat 3 pasal 74 ditandakan agar perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar pun sebenarnya dapat lebih proaktif dalam memfasilitasi dan membuat regulasi pelaksanaan *CSR*.

Jika dilihat dari sisi proses pelaksanaan program *CSR*, keseluruhan bidang pembangunan yang dilaksanakan sebagai mana disebutkan di atas belum mengarusutamakan peran dan prakarasa/inisiasi dari komunitas lokal. Hasil penelitian berdasarkan metode *FGD* menunjukkan bahwa program kerja *CSR* lebih merupakan program kerja perusahaan ketimbang program kerja komunitas lokal karena kegiatan yang dilakukan sudah merupakan paket-paket yang sudah dirancang oleh pihak perusahaan terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan pada setiap desa sampel. Penyusunan program belum dengan sungguh-sungguh meminta pendapat dan prakarsa dari komunitas lokal sehingga masih cenderung *top-down*. Fungsi sebagai perencanaan bagi komunitas lokal tidak tampak.

Partisipasi masyarakat mendukung pelaksanaan program *CSR* belum begitu tampak bahkan sebagian warga kurang memahaminya. Pelibatan warga diprioritaskan pada lapisan tokoh masyarakat saja seperti kepala desa dan BPD. Terungkap pula

bahwa terdapat kepala desa yang menjadi alat perusahaan untuk melegitimasi program kerja tertentu, padahal warga desa lainnya menginginkan program kerja yang berbeda. Perusahaan cenderung mencari jalan pintas untuk menekan biaya dan menghemat waktu sehingga mengakibatkan kurangnya sosialisasi program kerja kepada semua warga.

Kepala desa dan BPD sering dianggap sebagai representasi dari seluruh warga desa sehingga mereka inilah yang dihadirkan dalam penentuan program kerja. Mekanisme pelaksanaannya ialah mengundang mereka ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda pada saat presentasi AMDAL yang memberi sesi khusus menerima masukan dari setiap desa tentang program kerja yang akan dilakukan di setiap desa sampel. FKM belum dapat berperan secara optimal karena kurang adanya sinergi antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah lokal.

Terdapat beberapa komunitas lokal yang kecewa kepada pihak manajemen perusahaan karena desa sampel tempat dilakukan program *CSR* lebih ditentukan oleh pihak perusahaan. Komunitas lokal yang langsung mendapat dampak negatif dari aktivitas perusahaan tidak semuanya menjadi lokasi pelaksanaan program *CSR*. Seharusnya sejak hadirnya perusahaan komunitas lokal diberi akses untuk menyampaikan aspirasinya tentang keberadaan perusahaan tersebut.

Dilihat dari indikator pelaksanaan evaluasi program *CSR*,



tampak bahwa evaluasi program *CSR* tersebut belum berlangsung dengan baik. Semestinya untuk menilai berhasil tidaknya program *CSR* tergantung pada sejauh mana program tersebut bermanfaat untuk memberdayakan komunitas lokal. Penilaian tersebut sebetulnya ada pada komunitas lokal sendiri. Dalam prakteknya yang menilai keberhasilan program *CSR* justru ada pada pihak manajemen perusahaan. Hal ini terjadi karena program *CSR* sudah terlebih dahulu dikemas berupa paket-paket program yang siap untuk dilaksanakan pada setiap desa sehingga cenderung

seragam antara satu desa dengan desa lain dan kurang mempertimbangkan kebutuhan spesifik lokasi. Proses edukasi, yakni proses mendidik komunitas lokal untuk mampu menilai keberhasilan kinerjanya tidak berlangsung dengan baik.

Berdasarkan uraian tentang kemanfaatan program *CSR* bagi masyarakat maka secara keseluruhan rekapitulasi manfaat program *CSR* di empat desa yang dijadikan lokus penelitian tersebut bisa dilihat di tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Manfaat Program *CSR* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal

Desa/Kecamatan		Berambai/ Sempaja Utara			Kerta Buana/ Tenggarong Seberang			Separi Mahakam/ Tenggarong Seberang			Bukit Pariaman/ Tenggarong Seberang		
N (Responden)		(35)			(100)			(90)			(100)		
No.	Indikator	Frekuensi			Frekuensi			Frekuensi			Frekuensi		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Peningkatan Pendapatan	0	14	21	11	33	56	17	49	24	3	31	66
2.	Perbaikan Pendidikan	20	14	1	72	28	0	63	26	1	71	29	0
3.	Perbaikan Kesehatan	3	18	14	43	48	9	68	22	0	72	27	1
4.	Perbaikan Gizi	0	14	21	0	16	84	0	54	36	0	25	75
5.	Perbaikan Sandang	0	34	1	2	93	5	0	89	1	0	100	0
6.	Perbaikan Lembaga Perekonomian Desa	35	0	0	95	1	4	89	1	0	0	100	0

Ket.: 1: Rendah; 2: Sedang dan 3: Tinggi

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

(1) Secara umum Program *CSR* dapat memberikan manfaat: (a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pertambangan, terutama dilihat dari indikator (i) pendapatan, (ii) pendidikan, (iii) kesehatan, (iv) gizi, (v) sandang, dan (vi) lembaga perekonomian desa;

(2) Program *CSR* relatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada bidang: pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan infrastruktur. Namun, relatif kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada bidang pertanian dan ekonomi;

(3) Dalam kaitannya dengan beberapa bidang dan peran pemerintah daerah maka bisa disimpulkan



bahwa: (a) Program *CSR* relatif sinkron dengan pembangunan bidang pendidikan, namun belum sinkron dengan bidang pertanian dan; (d) Pemkab Kukar masih kurang berperan secara efektif sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator pelaksanaan program *CSR*;

- (4) Di sisi lain, proses pelaksanaan program *CSR* belum berlangsung dengan baik, yang ditandai antara lain: kurang mendorong partisipasi, prakarsa dan kesempatan bagi komunitas lokal untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya; *CSR* kurang berperan untuk mendidik komunitas lokal mengenali permasalahan dan mengatasi masalahnya; lebih bersifat *top down* daripada *bottom up*; dan FKM kurang berperan untuk merumuskan program kerja yang sesuai kebutuhan spesifik komunitas lokal karena program kerja merupakan paket yang sudah lebih dahulu dirancang oleh manajemen perusahaan.

Saran

- (1) Perlu komitmen yang kuat dari Pemkab Kukar untuk berperan sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator pelaksanaan *CSR*;
- (2) Manajemen Perusahaan perlu meningkatkan jumlah pendanaan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial-nya memberdayakan komunitas lokal dan memelihara kelestarian lingkungan;
- (3) Dana *CSR* dalam bentuk *charity* sudah saatnya dikurangi, tetapi

ditingkatkan pendanaan untuk pengembangan pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbarui (*renewable resources*) seperti pertanian, perikanan dan perkebunan;

- (4) Perlu dilaksanakan penelitian yang sama terhadap perusahaan yang sudah lebih lama melaksanakan program *CSR*-nya. Hasil-hasil penelitian tersebut akan dapat dijadikan referensi yang lebih baik untuk perumusan dan pelaksanaan *CSR* yang lebih baik ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Batten, T.R. 1957. *Communities and Their Development*, London: University Press.
- Dunham, Arthur. 1962. *Community Welfare Organization: Principles and Practice*, New York: Thomas Y.Crowell Company, 3th Printing.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development. Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*, Australia: Longman Australia Pty Ltd.
- Irwanto. 2006. *Focussed Group Discussion (FGD). Sebuah Pengantar Praktis*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rothman, Jack. 1995. *Approaches to Community Intervention*, New York: National Conference on Social Welfare.
- Pambudi, T.S. 2005. *CSR: Sebuah*



Keharusan dalam Investasi Sosial, Jakarta: Puspenmas Depsos RI.

Hidup. Pertambangan Batubara, Jalan Angkut dan Pelabuhan Batubara.

Sadikin, Ali. 2009. *Implementasi Program Community Development pada Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat*, Samarinda: Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman, tesis tidak dipublikasikan.

PT. Mahakam Sumber Jaya. 2004. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kegiatan Pertambangan Batubara PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya.

Dokumen

PT. Darma Putera Wahana Pratama. 2010. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Kegiatan IUPHHK-HA.

Peraturan Perundangan

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK-210.a/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2012.

PT. Khotai Makmur Insan Abadi. 2009. Analisis Dampak Lingkungan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

